

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Tapi ada beberapa Pengertian yang berbeda dari tiap ahli berikut petikannya:

Pengertian akuntansi menurut Warren dkk yang dialihbahasakan oleh farahmita dan hendrawan (2005 : 10) bahwa: “Secara umum, akuntansi dapat dedefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Pengertian akuntansi menurut Charles T. Horngren, dan Walter T. Harrison (Horngren Harrison, 2007 : 4) yang dialihbahasakan oleh Gina Ghania dan Danti Pujianti bahwa: “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Menurut American Accounting Association (AAA). Akuntansi itu merupakan :

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut “.

Definisi akuntansi menurut C. West Churman: “sebagai pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan.”

Definisi akuntansi menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2011:7)
“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya ada (kriteria). Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan menilai atau melihat apakah yang ada telah sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2011:4), auditing sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Definisi auditing tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan auditing harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Kompeten dan independen.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Selain itu, para auditor berusaha keras

mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

4. Pelaporan.

Laporan seperti ini, memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim (2008:147) tujuan audit adalah sebagai berikut :

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2008:200) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo, terdapat dua tujuan spesifik audit, yaitu :

1. Tujuan Audit yang berkaitan dengan transaksi:

a. Keterjadian

Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi.

b. Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

c. Keakuratan

Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi.

d. Posting dan pengikhtisaran

Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang di catat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar.

e. Klasifikasi

Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat, dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi.

f. Penetapan waktu

Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi *cutoff* manajemen.

2. Tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo

a. Eksistensi

Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan.

b. Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat.

c. Akurasi

Tujuan akurasi mengacu ke jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.

d. Klasifikasi

Klasifikasi digunakan untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukkan dalam akun yang benar.

e. Pisah Batas (*cutoff*)

Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat.

f. Hubungan yang rinci (*detail tie-in*)

Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar.

g. Nilai yang dapat direalisasi

Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih.

h. Hak dan Kewajiban

Tujuan ini merupakan cara akuntan publik memenuhi asersi mengenai hak dan kewajiban.

3. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan

Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah di bahas sebelumnya. Konsep yang sama,

yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2011:16) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional.
2. Audit Ketaatan.
3. Audit Laporan Keuangan.

Dari ketiga jenis audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan akankah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya,

kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

2.1.2.4 Auditor

Menurut Simamora, Henry (2002:47), ada 8 prinsip yang harus dimiliki seseorang auditor dalam menjalankan profesinya, yaitu :

1. **Tanggung jawab profesi**
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. **Kepentingan Publik**
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. **Integritas**
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
4. **Objektivitas**
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. **Kompetensi dan Kehati-hatian profesional**
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.
6. **Kerahasiaan**
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.
7. **Perilaku Profesional**
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. **Standar Teknis**
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

2.1.2.5 Jenis-jenis Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) jenis auditor terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Auditor Independen* (Akuntan Publik)
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis *auditeenya*. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan apapun.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara
3. *Internal Auditor* (Auditor Intern)

2.1.2.6 Auditing Sektor Publik

Boynton *et al.*, (2006) mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara berbagai asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian audit sector publik menurut Indra Bastian (2007:12) adalah sebagai berikut:

”Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.”

Pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai (2008:29) adalah sebagai berikut:

”Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan”

Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis, audit pada sektor publik sama dengan audit pada sektor swasta. Menurut Jones & Bates (1990) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggungjawab yang lebih luas dari pada audit pada sektor swasta.

Pelaksanaan audit atas instansi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka memberikan keyakinan bahwa laporan pertanggungjawaban yang menyangkut aspek keuangan dan operasional, kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Meurut Jones dan Bates (1990) yang dialihbahasakan oleh Rahmadi, dkk (2011:18), terdapat empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu:

1. Pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi,
2. Pemisahan sumber dana,
3. Rendahnya independensi pihak manajemen, dan
4. Pengaruh keputusan organisasi sector publik terhadap masyarakat (sosial).

Tanggung jawab auditor sektor publik berdasarkan hukum dan peraturan sama seperti auditor entitas sektor swasta. Meskipun demikian, dalam hal tertentu, tanggung jawab auditor sektor publik lebih luas daripada auditor sektor swasta, karena peraturan atau tugas dan kewajiban lain yang dibebankan kepada mereka.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK-RI, 2007: 13), tugas auditor pemerintah meliputi Audit Keuangan dan Audit Kinerja, selain itu juga melakukan Audit Investigasi.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Untuk itu audit untuk sektor pemerintahan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara yang terdiri dari audit keuangan, audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu/audit investigasi.

2.1.2.7 Standar Auditing

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam hal ini adalah standar auditing. Standar Auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

IAI menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing meliputi (SPAP, 2013) menyatakan :

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan peltihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan edngan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestnya.
 - b. Pemahamann memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu aser bahwa keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Standar-standar tersebut diatas dalam banyak hal saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keadaan yang berhuungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.1.3 Skeptisisme

2.1.3.1 Pengertian Skeptisisme

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisisme sebagai berikut :
 “Skeptisisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Skeptisisme atau mempertanyakan, ketidakpercayaan, berasal dari bahasa Yunani *skeptomai*. Dalam penggunaan umumnya adalah untuk melihat sekitar, untuk mempertimbangkan. Jika dilihat dari perbedaan ejaan kata merujuk kepada :

1. Suatu sikap keraguan atau disposisi untuk keraguan baik secara umum atau menuju objek tertentu
2. Doktrin yang benar ilmu pengetahuan atau terdapat di wilayah tertentu belum pasti
3. Metode ditangguhkan pertimbangan atau keraguan sistematis.

Dalam filsafat, skeptisisme adalah merujuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang:

1. Sebuah pertanyaan
2. Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus menerus pengujian
3. Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral
4. Keterbatasan pengetahuan
5. Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditangguhkan.

(Sumber : www.wikipedia.com Tanggal 18 maret 2013 Pukul 13:39 WIB)

Skeptisisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran paham yg memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, mencurigakan. (Sumber : kamus.sabda.org/kamus/skeptisisme Tanggal 18 Maret 2013 Pukul 13:49 WIB).

Dalam penelitian Quadackers, Groot, dan Wight yang berjudul “ *A Study of Auditors Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgments and Decision*” mengutip pengertian skeptisisme menurut ahli filosofi Kurtz (2009:11) sebagai berikut :

“sketikos means to consider or examine, skepsis means inquiry and doubt, skeptics means seeking clarifications and definition, demanding reason, evidence, or proof”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan skeptisisme merupakan sikap seseorang untuk mempertimbangkan, menilai dari suatu kejadian untuk mencari nilai kebenaran dari kejadian tersebut, berusaha untuk mencari bukti, klarifikasi dan penyesuaian, dengan berbagai perspektif dan argumen.

2.1.3.2 Pengertian Skeptisisme Profesional Auditor

Skeptisisme profesional (*professional scepticism*) sebagaimana yang didefinisikan dalam PSA No. 70 tentang pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan adalah:

“Suatu sikap yang mencakup pikiran bertanya dan penentuan secara kritis bukti audit”.

Skeptisisme profesional menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dalam Standar Umum juga diartikan sebagai sikap yang mencakup pikiran

yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Jadi, auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Sikap ini dipersyaratkan juga dalam SPAP terkait ketentuan terkait kewajiban auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Shaub & Lawrence (1996) dikutip dalam penelitian Suraida (2005) memberikan definisi tentang skeptisisme profesional auditor sebagai berikut:

"Professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor's duty to prevent or reduce the harmful consequences of another person's behavior".

Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan klien atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Auditor menunjukkan skeptisisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan. Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien.

Maka skeptisisme merupakan sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Dalam prakteknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap

asersi manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk „*balance*’ antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut.

2.1.3.3 Proses Skeptisisme Profesional

Proses dalam skeptisisme profesional auditor menurut Hurt, Eining, dan Plumble (2008 : 48) diantaranya sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*)
Karakteristik yang berhubungan yaitu:
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*question mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian dan pembuktian atas sesuatu.
 - b. Suspense pada penilaian (*suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk menukung pertimbangan tersebut.
 - c. Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi.
2. Memahami penyedia informasi (*understanding evidence providers*)
Karakteristik yang berhubungan adalah pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi dan integritas dari penyedia informasi.
3. Mengambil tindakan atau bukti (*acting on the evidence*)
Karakteristik yang berhubungan yaitu:
 - a. Percaya diri (*self confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan sendiri (*self determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan uraian di atas maka proses untuk menjadi skeptisisme profesional auditor terdapat 3 yaitu, memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*), memahami penyedia informasi (*understanding evidence providers*), dan mengambil tindakan atau bukti (*acting on the evidence*).

2.1.3.4 Dimensi Skeptisisme Profesional

SPAP 2013 : SA seksi 200 mendefinisikan skeptisisme profesional

sebagai berikut :

“Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu waspada dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif. ”

Dalam penelitian ini, penulis mengukur dimensi menurut Ida Suraida (2005) dalam jurnal yaitu sebagai berikut : Sikap keraguan terhadap informasi dan evaluasi kritis terhadap bukti audit yaitu sebagai berikut :

a. Keraguan auditor

Menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Setiap perencanaan audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu ragu dan mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis (Alvin a. Arens, 2008:436)) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo.

b. Audit tambahan

Audit tambahan dilaksanakan apabila terdapat kekeliruan atau terdapat penugasan yang belum sempurna.

c. Konfirmasi langsung

Menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ke tiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponnya secara langsung kepada auditor. (Alvin a. Arens, 2008:233) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo.

2.1.4 Pengalaman Kerja

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman Kerja

Menurut Loehoer (2002) dalam Maburi dan Winarna (2010:8), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Sedangkan Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006:12) menyatakan pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bias juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengalaman adalah gabungan dari semua yang dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung melalui interaksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan pengindraan.

2.1.4.2 Pengertian Pengalaman Kerja Auditor

Menurut Ida Suraida (2005) Pengalaman auditor adalah:

“Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.”

Menurut Marchant G.A (1989) dan (Davis 1996) dalam Ida Suraida (2005) menemukan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman mampu mengidentifikasi secara lebih baik mengenai kesalahan-kesalahan dalam telaah analitik. Akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi yang relevan. Menurut Tubbs (1992) dalam Ida Suraida (2005) menemukan dalam salah satu penelitiannya bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman menjadi sadar mengenai kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim.

Mulyadi (2007:24) mendefinisikan bahwa:

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi.”

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa pengalaman audit diperoleh akuntan publik selama mereka mengerjakan penugasan auditnya. Pengalaman akan diperoleh jika prosedur penugasan dan supervisi berjalan dengan baik.

Menurut Mulyadi (2009:25) sesuai SK Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Agar akuntan baru

selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor merupakan akumulasi gabungan yang diperoleh dari interaksi dan seorang auditor paling tidak harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan pengalaman diperoleh jika prosedur penugasan dan supervisi berjalan dengan baik.

2.1.4.3 Kriteria Pengalaman

Menurut Tubs (1992) dalam Singgih dan Bawono (2010) kriteria pengalaman terdiri dari:

1. Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan.

Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya kekeliruan.

2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit.

Semakin berpengalaman seorang auditor, maka akan dapat menyelesaikan tugas audit tepat waktu.

3. Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan.

Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan tujuan dan sistem akuntansi melandasinya.

4. Kesalahan dalam melakukan tugas audit.

Semakin berpengalaman seorang auditor, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit diminimalisasi.

2.1.4.4 Unsur-unsur Pengalaman Kerja Auditor

Menurut Mulyadi (2002:25):

“Jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997).”

Indikator pengalaman auditor menurut Knoers dan Haditono (1999)

Menurut penelitian Singgih dan Bawono (2010) ada 2 indikator yang berhubungan dengan pengalaman audit

1. Lamanya menjadi auditor

Lamanya bekerja sebagai auditor menghasilkan struktur dalam proses penilaian auditor. Struktur ini menentukan seleksi auditor, memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas.

2. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan

Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan

lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya.

2.1.5 Kualitas Proses Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Proses Audit

(Akmal, 2006:65) Pengertian Kualitas adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh subjek/objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek/objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut.

(Sososutikno, 2003) Kualitas audit adalah Probabilitas seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa :

“kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Kualitas audit diartikan oleh De angelo dalam Eunike (2007) :

“Sebagai gabungan *probabilitas* seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probabilitas*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan dan melaporkannya apabila ada penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan yang relevan.

2.1.5.2 Standar Pengendalian Kualitas

Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, dan Marks S. Beasley yang dialihbahasakan ke dalam buku Herman Wibowo (2008:47) menyatakan bahwa:

“Pengendalian kualitas merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditingnya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Menurut (SPAP, 2013 ; 200 : 1) standar auditing terdiri dari :

1. Standar Umum

Standar umum terdiri dari:

a. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b. Sikap mental independen

Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

c. Kemahiran professional dengan cermat dan seksama

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

A. Perencanaan dan supervise audit

1) Perencanaan

Merupakan rancangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang di harapkan, yang meliputi penentuan:

a) Sifat, luas, dan saat pelaksanaan audit

Prosedur yang dapat di pertimbangkan oleh auditor daalm perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan porseni lain dalam kantor akuntan dan personel entitas prosedur tersebut.

b) Program Audit

Dalam perencanaan audit auditor juga harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit.

2) Supervise

Mencakup pengaruh usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

B. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, penentuan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan

C. Bukti audit kompeten yang cukup

Bukti audit yang kompeten yang cukup harus di peroleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar pelaporan

- a. Pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia
- b. Pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus menunjukan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi daalm penyusunan laporan keuangan periode berjalan di bandingkan

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan

pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lapaoran auditor.

d. Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat di berikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat di berikan maka alasanya harus dinyatakan.dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang di pikul oleh auditor.

2.1.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Proses Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) yang dialihbahasakan oleh Nasrullah Djamil (2007) empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas proses audit adalah:

1. (*Tenure Audit*)

Adalah lamanya waktu auditor tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit/unit usaha/perusahaan atau instansi, peneliti berasumsi bahwa semakin lama dia telah melakukan audit, maka kualitas audit yang

dihasilkan akan semakin rendah, karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap professional skeptisme.

2. Jumlah klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3. Kesehatan Keuangan Klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.

4. Telaah dari Rekan Auditor (*peer Review*)

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di *review* pihak ketiga atau rekan auditor.

2.1.5.4 Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Proses Audit

Dalam jurnal symposium nasional akuntansi Nasrullah Djamil (2003) menyatakan bahwa terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit, diantaranya:

1. Meningkatkan Pendidikan Profesional

Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.

2. Mempertahankan independensi dalam sikap mental

Artinya dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Menggunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya agar petugas audit memahami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik

Melakukan perencanaan pekerjaan audit sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.

5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik

Melaksanakan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atau laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak, dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.5.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian sekarang
Sukriah, dkk (2009)	Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan	Pengalaman kerja, objektivitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.	Variabel independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi tidak digunakan dalam penelitian ini.

Gumilar Dwipayana Ridwan (2014)	Pengaruh Kompetensi, pengalaman kerja, skeptisisme profesional terhadap kualitas audit	- Kompetensi dan Skeptisisme dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	Variabel kompetensi tidak digunakan dalam penelitian ini.
Rita Anugerah, Sony Harsono Akbar (2014)	Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit	- Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit - Kompleksitas tugas tidak memberi pengaruh terhadap kualitas audit. - Skeptisme profesional mempengaruhi kualitas audinya.	- Variabel kompetensi dan kompleksitas tugas tidak digunakan dalam penelitian ini. - Penelitian sekarang pada KAP di Bandung
Arrivan Novrizal (2015)	Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Profesional Skeptisisme terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	- Kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Profesional skeptisisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	- Variabel kompleksitas tugas tidak digunakan dalam penelitian ini. - Penelitian sekarang pada KAP di Bandung

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengalaman kerja dan skeptisisme profesional dapat mempengaruhi kualitas audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Profesi akuntan publik, ialah profesi dimana seorang akuntan atau disebut auditor bekerja untuk melayani jasa publik. Yang dimana jasa publik tersebut meliputi, memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, memberikan suatu analisa laporan keuangan, memberikan tanggapan atas kejadian yang terjadi dimasyarakat khususnya mengenai kinerja keuangan.

2.2.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Proses Audit

Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidak setujuan dengan pernyataan klien atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Auditor menunjukkan skeptisisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan. Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien.

Menurut Ida Suraida (2005), Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang dimiliki auditor yang selalu mempertanyakan, meragukan bukti audit apabila tidak merima konfirmasi langsung dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor..Keraguan seorang auditor ini akan menghasilkan penambahan audit yang dilaksanakan demi menentukan ketepatan pemberian opini seorang auditor.

2.2.2 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Proses Audit

Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis (Singgih dan Bawono, 2010).

Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya (Aji, 2009:5) dalam Singgih dan Bawono, 2010). Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya.

Dian Indri Purnamasari (2005) dalam Singgih dan Bawono (2010) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya : mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Jadi pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah

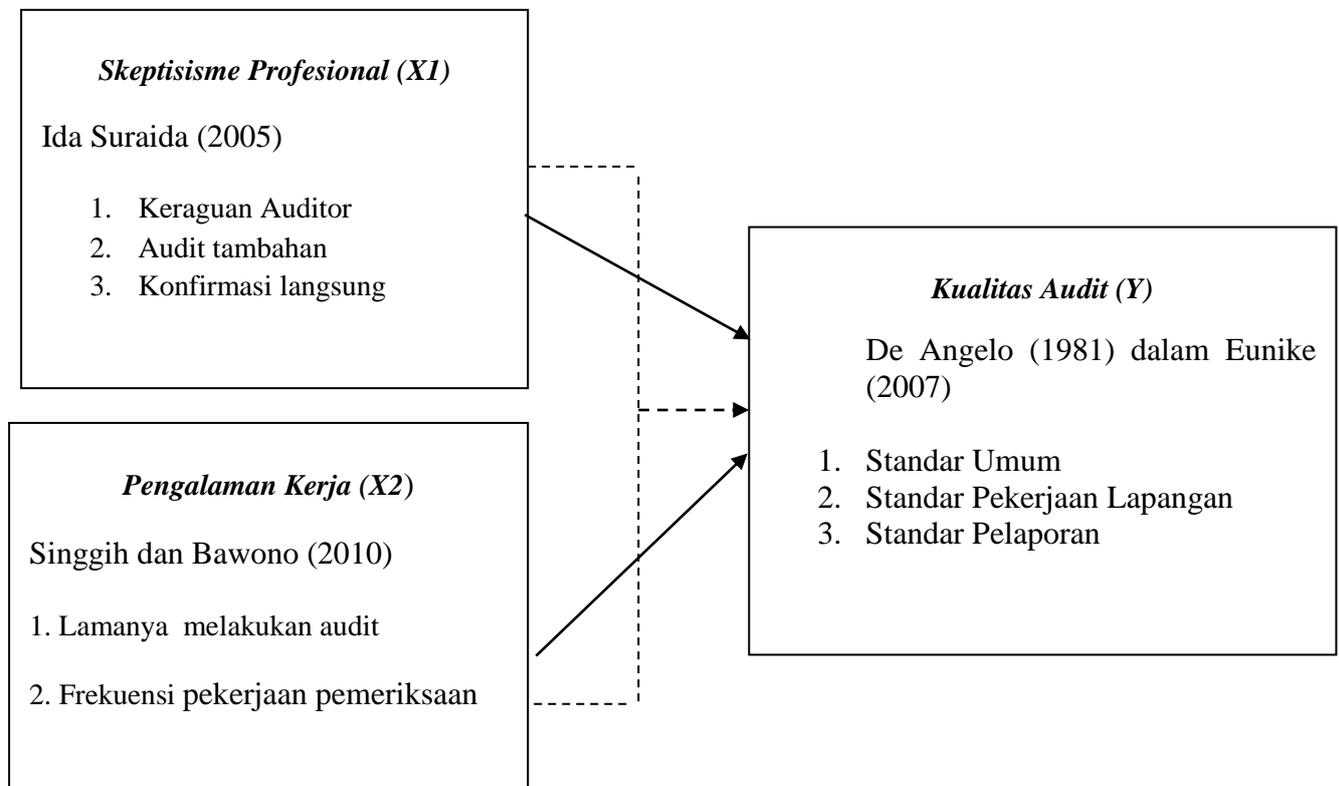
profesi yang membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi seperti akuntan publik, karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas pekerjaan seorang auditor.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan seiring kemajuan teknologi dan informasi, keterampilan auditor dituntut untuk berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan teknologi adalah melalui program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri auditor memerlukan pelatihan dalam bidang akuntansi dan auditing, serta bidang-bidang operasional lain yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sikap skeptisisme profesional auditor harus ditingkatkan untuk dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik serta mengantisipasi semua keadaan yang mungkin dihadapi akibat kemajuan yang begitu pesat.

Paradigma penelitian menurut Sugiyono (2008:63) adalah:

“Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk menentukan rumus hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan paradigma pemikiran di bawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Kata hipotesis berasal dari kata “*hipo*” yang artinya lemah dan “*tesis*” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah: “Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1. Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit KAP di Bandung
- H2. Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit KAP di Bandung.
- H3. Skeptisisme Profesional Auditor dan Pengalaman Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas proses audit KAP di Bandung.